

# KOLABORASI PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

Kinta Risa Asyifa

NPP. 32.0532

Asdaf Kota Semarang, Provinsi Jawa-Tengah  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: kintarisaa@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Irfan Uluputty, S.STP., M.Si.

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The issue of street children reflects the complexity of social problems that threaten the fulfillment of children's rights and urban social stability. In Semarang City, the existence of street children shows an alarming intensity, along with weak coordination across agencies in handling strategies. The complexity of the problem is exacerbated by a repressive approach and a lack of consistency in program planning. The fragmentation of roles between Satpol PP, the Social Service, and the Anantaka Foundation has led to inefficiencies in interventions, with the impact of repeated road cycle re-production and failure to integrate into the social protection system. **Purpose:** The purpose of the research is to explore the dynamics of collaboration between agencies in the context of handling street children through the framework of collaborative governance theory. **Method:** The purpose of the research is to explore the dynamics of collaboration between agencies in the context of handling street children through the framework of collaborative governance theory. The research was carried out in the administrative area of Semarang City with an exploratory qualitative approach. Information was collected through in-depth interviews with representatives from Satpol PP, Dinsos, Anantaka Foundation, and street children who participated in the learning program. The interview data were analyzed thematically and confirmed by triangulating observation and documentation data. **Result:** The findings indicate that the form of collaboration is still sectoral, predominantly relies on unilateral initiatives, and has not shown a participatory and sustainability-oriented governance pattern. **Conclusion:** The research recommendations emphasize the need for the establishment of a permanent multi-stakeholder forum, strengthening formal agreements between agencies, and developing evaluative mechanisms based on collaborative performance indicators. **Keywords:** Street Children, Government Collaboration, Peace and Order, Participation

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Isu anak jalanan mencerminkan kompleksitas permasalahan sosial yang mengancam pemenuhan hak anak serta kestabilan sosial perkotaan. Di Kota Semarang, keberadaan anak jalanan menunjukkan intensitas yang mengkhawatirkan, seiring dengan lemahnya koordinasi lintas instansi dalam strategi penanganan. Kompleksitas masalah diperparah oleh pendekatan yang masih bersifat represif dan minimnya konsistensi dalam perencanaan program. Fragmentasi peran antara Satpol PP, Dinsos, dan Yayasan Anantaka menimbulkan ketidakefisienan intervensi, dengan dampak berupa re-produksi siklus jalanan yang

berulang dan kegagalan integrasi ke dalam sistem perlindungan sosial. **Tujuan:** Tujuan penelitian mengeksplorasi dinamika kolaborasi antar instansi dalam konteks penanganan anak jalanan melalui kerangka teori *collaborative governance*. **Metode:** Penelitian dilaksanakan di wilayah administratif Kota Semarang dengan pendekatan kualitatif eksploratif. Informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perwakilan dari Satpol-PP, Dinsos, Yayasan Anantaka, serta anak jalanan yang mengikuti program pembelajaran. Data hasil wawancara dianalisis secara tematik dan dikonfirmasi dengan triangulasi data observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan mengindikasikan bentuk kolaborasi masih bersifat sektoral, dominan bersandar pada inisiatif sepihak, serta belum menunjukkan pola tata kelola yang partisipatif dan berorientasi keberlanjutan. **Kesimpulan:** Rekomendasi penelitian menekankan pada kebutuhan pembentukan forum multi pihak yang permanen, penguatan kesepakatan formal antar instansi, serta pengembangan mekanisme evaluatif berbasis indikator kinerja kolaboratif. **Kata kunci:** Anak Jalanan, Kolaborasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban, Partisipasi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

UNICEF berkomitmen untuk menyediakan layanan dan sumber daya yang dibutuhkan oleh anak-anak di Indonesia, dengan fokus pada kesejahteraan anak. Pemerintah Indonesia juga menunjukkan perhatian besar terhadap kesejahteraan anak di tingkat global dan nasional. Kerja sama UNICEF dengan Indonesia berfokus pada memastikan kelangsungan hidup anak-anak, agar mendapatkan pendidikan dan perawatan yang dibutuhkan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan anak-anak di negara ini melalui kerangka komitmen dan sistem perencanaan yang dirancang untuk melindungi kepentingan serta hak-hak anak. (UNICEF, 2023)

Indonesia menetapkan tujuan untuk mencapai “Indonesia Emas” dengan menetapkan strategi pembangunan jangka panjang nasional 2023-2045. Visi ini hanya dapat terwujud apabila pembangunan dilakukan secara inklusif dan menyeluruh. Salah satu acuan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 adalah bonus demografi yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 dengan presentase 68,3%. Untuk meraih cita-cita ini, Indonesia perlu memprioritaskan anak-anak agar tetap menjadi fokus dalam usaha mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa memegang peran penting dalam menentukan arah masa depan negara. Oleh karena itu, memastikan terpenuhinya hak-hak dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan, menjadi investasi jangka panjang yang sangat krusial. (Sekretariat RPJPN 2025-2045, 2023)

Negara hadir memberikan perlindungan fakir miskin dan anak-anak terlantar yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menekankan pencapaian target tujuan ke-1 (satu) SDGs 2030 dengan berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia (Bappenas, 2023). Pada tataran implementasinya, setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera, yang mencakup akses terhadap pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (R. Slamet, 2021)

Anak jalanan didefinisikan sebagai anak dengan usia berkisar 5-18 tahun baik laki-laki maupun perempuan, yang menghabiskan sebagian besar waktu di jalan untuk mencari uang. Dengan keterbatasan hubungan komunikasi atau bahkan tidak sama sekali dengan keluarganya, serta kurang mendapatkan pengawasan dan perlindungan sehingga rentan terhadap masalah kesehatan dan psikologis (Sosial, 2019). Faktanya permasalahan anak jalanan ini banyak ditemukan terutama di

perkotaan. Keberadaan anak jalanan pun juga tersebar hampir di seluruh dunia terutama negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan data dari International Labour Organization (ILO), sebanyak 264 juta anak terpaksa bekerja, dengan 7,3 juta di antaranya berusia di bawah 10 tahun, terdapat 18 ribu anak jalanan di Indonesia . (Sandriana, 2022)

Keberlanjutan kolaborasi antara instansi diperlukan dalam memaksimalkan fungsi pemerintah secara efektif. Perhatian pemerintah terhadap anak jalanan hingga saat ini belum optimal. Kondisi yang terjadi sebagaimana fakta permasalahan penanganan anak jalanan di beberapa daerah yaitu belum optimalnya mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program penanganan anak jalanan sehingga mengakibatkan belum efektifnya peran antar instansi di daerah dalam penanganan anak jalanan. Peran penanganan anak jalanan tidak hanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial (Dinsos) saja, melainkan diperlukan keberlanjutan kolaborasi dengan instansi lainnya terkait pemberdayaan anak jalanan. Dimana kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan dilakukan oleh instansi swasta seperti yayasan. (Sandriana, 2022)

Permasalahan anak turun kejalanan yang terus bertambah sampai pada saat ini. Di Kota Makassar, meskipun menyandang status sebagai "Kota Anak Ramah", jumlah anak jalanan terus meningkat karena minimnya perhatian pemerintah dan ketiadaan panti rehabilitasi. Koordinasi antara Satpol PP dan Dinsos hanya sebatas pendataan dan pemulangan, tanpa upaya berkelanjutan (Nawi, 2023). Sementara di Kota Serang, keberadaan Rumah Singgah Kampung Sapih tidak dimanfaatkan secara optimal dan kolaborasi antarinstansi masih lemah, membuat program penanganan anak jalanan tidak efektif dan cenderung bersifat formalitas (Hasanah, 2021). Berbeda dengan Kota Padang, Dinsos mengembangkan inovasi RASAILAH DAKU yang melibatkan yayasan sosial dan masyarakat dalam pembinaan anak jalanan secara terpadu, mencakup pendidikan dan pelatihan keterampilan (Alifa Fairuz Shabira, 2024). Adapun di Kota Cirebon, keberhasilan pengurangan anak jalanan dicapai melalui sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, dengan penempatan anak jalanan di Rumah Singgah Dukuh Semar dan pelaksanaan berbagai program pemberdayaan seperti bimbingan belajar, spiritual, dan pemberian tabungan.(Suryadi, 2021)

Program rehabilitasi yang melibatkan komunitas dan dukungan pendidikan terbukti efektif dalam membantu anak jalanan kembali ke masyarakat, dengan cara memenuhi kebutuhan psikologis mereka, memberikan pelatihan keterampilan, serta memperbaiki hubungan dengan keluarga mereka (Ali, 2020). Walaupun pendidikan inklusif dan program rehabilitasi bisa membantu anak jalanan, tantangan besar muncul akibat stigma sosial dan pengalaman hidup mereka di jalan, yang sering menghambat proses reintegrasi ke dalam masyarakat (Gabriel Julian, 2024). Situasi ini membuat mereka lebih rentan terhadap masalah psikososial, seperti gangguan emosional, perilaku yang menyimpang, dan trauma. Dalam hal ini, relawan masyarakat memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan mental anak jalanan, meskipun mereka sering kali kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan intervensi konseling berbasis psikososial untuk menghadapi tantangan ini. (Ecep Supriatna, Rahmat Syarif Hidayat, Eunkeu Agiatai, 2024)

Permasalahan anak jalanan di beberapa daerah seperti yang telah dijelaskan di atas menunjukkan minat dalam penelitian ini yaitu pentingnya kolaborasi antar instansi termasuk sektor swasta dan masyarakat dalam penanganan anak jalanan. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa penanganan anak jalanan di beberapa daerah tidak optimal karena mekanisme koordinasi dan sinergitas program belum berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya peran instansi dalam menangani masalah ini.

Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Semarang berdampak langsung pada meningkatnya jumlah masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial (PMKS), salah

satunya adalah fenomena anak jalanan. Keterbatasan akses pendidikan dalam keluarga dan tekanan ekonomi mendorong sebagian orang tua untuk melibatkan anak-anaknya dalam aktivitas kerja di jalanan. Anak-anak ini, yang termasuk dalam kelompok usia paling rentan terhadap kemiskinan, banyak ditemukan di lokasi-lokasi umum seperti pusat perbelanjaan, terminal, dan persimpangan jalan. Keberadaan mereka tidak hanya mencerminkan kegagalan pemenuhan hak anak, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial dan mengganggu estetika tata ruang kota. (Dispendukapil, 2022)

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak jalanan di Kota Semarang hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Upaya penertiban yang dilakukan pemerintah melalui razia dan penyuluhan belum memberikan hasil yang signifikan, karena anak-anak tersebut sering kembali ke jalan akibat belum adanya solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Bantuan berupa pesangon atau penyuluhan bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan struktural seperti pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya sistem perlindungan anak yang kuat. (Saffanata, 2024)

Sebagai bentuk kepedulian, Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, serta melibatkan Satpol PP dan Dinsos dalam penegakan dan pemberdayaan. Namun, implementasinya masih belum efektif, terbukti dengan masih banyaknya anak jalanan yang berkeliaran. Hal ini menjadi ironi, mengingat Kota Semarang telah meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) tingkat utama pada tahun 2023. Meski beberapa inisiatif KLA seperti akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak telah dijalankan, keberadaan anak jalanan yang tinggi menunjukkan adanya kesenjangan antara penghargaan simbolik dan realitas penanganan masalah sosial di lapangan. (Darmawan, 2023)

Serangkaian masalah yang telah dijelaskan di atas menjadikan dasar dalam penelitian ini. Sebagaimana dengan prinsip “Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun” sesuai dengan tujuan pertama dari SDGs 2030, negara memastikan tidak boleh ada kelompok masyarakat yang tertinggal dari berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa pentingnya kolaborasi instansi pemerintah, swasta dan masyarakat yang menjadi faktor determinan dalam penanganan berbagai permasalahan pemerintah.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penanganan anak jalanan masih menyisakan sejumlah kesenjangan yang belum sepenuhnya terjawab dalam penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya menyangkut keberlanjutan kolaborasi antarinstansi, efektivitas koordinasi dan komunikasi lintas instansi, keterbatasan data yang akurat dan terkini, resistensi dari pihak anak jalanan sendiri, serta peran masyarakat dalam membentuk persepsi dan perilaku anak jalanan. Terputusnya kesinambungan kolaborasi antara instansi terkait menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan anak jalanan di Kota Semarang. Meskipun berbagai program telah dirancang secara lintas sektoral, pelaksanaannya kerap tidak berkelanjutan. Ketidakteraturan dalam kerja sama ini mengakibatkan ketidakefisienan program, karena masing-masing instansi bekerja secara parsial tanpa rujukan strategis yang sama.

Lemahnya koordinasi dan komunikasi antarlembaga turut memperparah permasalahan yang ada. Setiap instansi memiliki kebijakan dan pendekatan tersendiri dalam menangani anak jalanan, namun tidak didukung oleh mekanisme komunikasi yang efektif. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kebijakan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program di lapangan. Minimnya ketersediaan data yang akurat dan terkini mengenai jumlah serta distribusi anak jalanan menjadi hambatan dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Data yang digunakan oleh instansi kerap tidak sinkron, bahkan tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Situasi ini berdampak pada kurangnya akurasi dalam penentuan sasaran program serta efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Resistensi yang ditunjukkan oleh anak jalanan terhadap upaya penertiban merupakan cerminan dari pendekatan yang belum sesuai dengan kebutuhan psikososial mereka. Penanganan yang bersifat koersif justru menimbulkan ketidakpercayaan dan penolakan terhadap intervensi yang dilakukan. Ketiadaan pendekatan yang partisipatif dan empatik menghambat keberhasilan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak jalanan. Stigma masyarakat yang mengasihani anak jalanan dan bahkan memberi uang secara langsung turut memperparah siklus keberadaan mereka di jalan. Praktik ini tanpa disadari memperkuat motivasi anak untuk tetap berada di ruang publik demi mendapatkan belas kasih. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya strategi edukasi publik yang menyeluruh agar masyarakat memahami dampak dari pemberian tersebut dan lebih memilih bentuk bantuan yang konstruktif. Oleh karena itu, peran masyarakat sebagai aktor kunci dalam penanganan anak jalanan perlu lebih diperkuat melalui pendekatan sosialisasi dan partisipasi berbasis komunitas.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Mengakses sumber informasi yang relevan, termasuk penelitian terdahulu, sangat penting dalam penelitian. Penelitian sebelumnya dapat memperkuat argumen, meskipun dengan teori yang berbeda, serta memberikan wawasan tambahan yang memperkaya pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Dengan mengkaji studi sebelumnya, kesenjangan penelitian dapat diidentifikasi, sekaligus memperjelas kontribusi penelitian ini terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini didorong oleh sejumlah studi terdahulu yang membahas penanganan anak jalanan yang melibatkan peran serta pemerintah dan komunitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Alifa Fairuz Shabira (2024) dengan judul *Inovasi Dinas Sosial Kota Padang Dalam Penanganan Anak Jalanan Melalui Program Raisalah Daku* menemukan bahwa perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial merupakan langkah penting dalam mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Padang. Program tersebut berhasil memberikan anak-anak jalanan akses kepada pendidikan, rehabilitasi sosial, serta reintegrasi dengan keluarga mereka. Penelitian oleh Rumah Singgah Dukuh Semar di Cirebon oleh (Suryadi et al., 2020) dengan judul *Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Komunitas* juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis community development dalam penanganan anak jalanan. Rumah Singgah Dukuh Semar berhasil memberdayakan anak jalanan melalui program-program bimbingan belajar, bimbingan spiritual, dan pengembangan bakat serta minat yang terbukti mengurangi jumlah anak jalanan di daerah tersebut.

Model penanganan anak jalanan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Makassar juga mengindikasikan pentingnya evaluasi kebijakan dalam penanggulangan anak jalanan. Penelitian ini dilaksanakan oleh (Rusdin Nawi, 2020) dengan judul *Model Penanganan Anak Jalanan Di Kota Makassar* menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Kota Makassar telah menjalankan berbagai program untuk mengurangi jumlah anak jalanan, namun keberhasilan tersebut belum maksimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya inovasi dalam implementasi kebijakan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Hasanah et. all., 2018) dengan judul *Efektivitas Program Penanggulangan Anak Jalanan Berbasis Community Development* di Kota Serang menunjukkan Dinsos dan Satpol PP Kota Serang juga menunjukkan bahwa pengembangan program berbasis komunitas, seperti Rumah Singgah, dapat membantu penanganan anak jalanan, meskipun implementasinya belum optimal karena kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait.

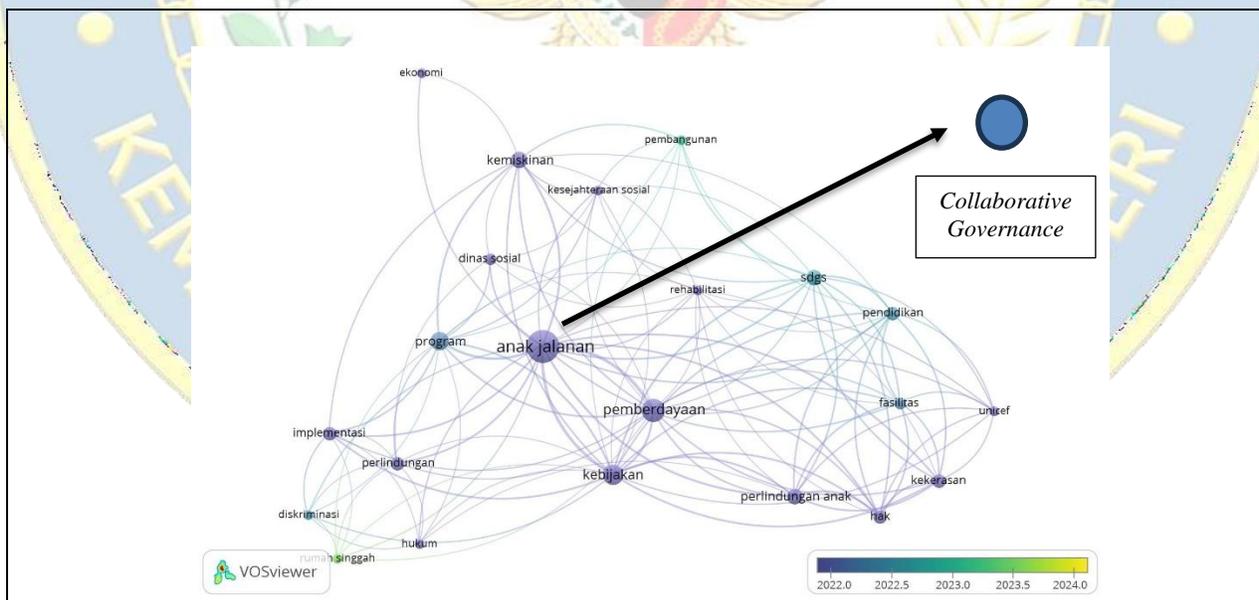
Penanganan anak jalanan di Kota Surabaya yang dilakukan oleh (Dian Tania Rachman, 2023) dengan judul *Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya*

menunjukkan upaya yang cukup komprehensif melalui program pembinaan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan minat bakat di rumah singgah UPTD KAMPUNG ANAK NEGERI (KANRI). Namun, pelaksanaan program tersebut tidak sepenuhnya berhasil, ditandai dengan masih banyaknya anak yang kembali ke jalan setelah pembinaan. Beberapa kendala utama yang menyebabkan hal ini antara lain keterbatasan dana dan fasilitas, pendeknya durasi pembinaan yang tidak sebanding dengan lamanya kehidupan anak di jalanan, lemahnya pendekatan terhadap anak dan keluarga, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang masih memberi uang kepada anak-anak jalanan, sehingga memperkuat kebiasaan mereka untuk tetap beraktivitas di jalan. (Rachman, 2023)

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu memberikan landasan yang kuat untuk penelitian ini, yang menyoroti perlunya pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penanganan anak jalanan. Pemberdayaan berbasis komunitas, peningkatan sosialisasi, serta penyusunan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada data yang akurat menjadi hal penting untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani permasalahan anak jalanan di berbagai kota di Indonesia.

#### 1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti mengambil 25 referensi penelitian terdahulu sebagai studi pustaka terhadap permasalahan penanganan anak jalanan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis lebih lanjut melalui aplikasi VOSviewer untuk menghasilkan bibliometrik. Dalam konteks penelitian kualitatif, bibliometrik berguna untuk mengidentifikasi topik-topik yang tengah populer dan tren dari penelitian yang berkembang. Penerapannya adalah menunjukkan hubungan antar kumpulan data serta mengunci dimana letak persamaan, perbedaan, gap penelitian yang berkaitan mengenai penanganan anak jalanan (Dion, 2024). Sehingga dapat ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar tersebut menerangkan bahwa penelitian terdahulu dijadikan sebagai studi pustaka terhadap permasalahan penanganan anak jalanan dengan menampilkan bibliometrik secara Overlay Visualization. Bulatan besar menjadi penanda bahwa topik tersebut ialah isu yang paling sering dilakukan penelitian, yakni anak jalanan. Pada tampilan ini, berdasar parameter waktu yang berada

di pojok kanan bawah menggambarkan isu anak jalanan yang berwarna hijau tersebut memiliki arti penelitian ini dilakukan dengan rentang 2022 hingga 2024. dengan menampilkan bibliometrik secara Overlay Visualization.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan terdapat gap penelitian, yakni perbedaan konsep yang digunakan dalam penelitian. Letak penelitian ini dalam penelitian terdahulu dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi VOSviewer adalah mengangkat mengenai collaborative governance dengan SDGs juga menjadi faktor determinan dalam penelitian ini pada tujuan ke-1 yakni “Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun”. Perbedaan konsep yang digunakan melibatkan kolaborasi antar instansi terkait dalam melakukan penanganan anak jalanan, sehingga penelitian yang dilaksanakan memiliki keterbaruan dari penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian sebelumnya terlihat pada metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi kolaborasi penanganan anak jalanan di Kota Semarang, yang dilakukan pada Satpol PP, Dinsos dan Yayasan Anantaka. Penyelidikan kolaborasi yang dilakukan ditekankan pada dimensi-dimensi kolaborasi, sehingga akan memperoleh gambaran informasi yang dibutuhkan.

## **II. METODE**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif eksploratif dengan menggunakan metode studi kasus untuk mendalami fenomena kolaborasi dalam penanganan anak jalanan di Kota Semarang (Hasan, 2017). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait permasalahan yang ada, serta mencari solusi yang relevan dengan konteks alami melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh institusi terkait, seperti Satpol PP, Dinsos, dan Yayasan Anantaka (Suprpto, 2017). Informan dipilih dengan berdasar pada siapa yang dianggap mampu memberikan informasi mendalam, yang melibatkan perwakilan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang terlibat dalam program tersebut. (Wasistiono, 2024)

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, serta dokumentasi untuk memastikan keabsahan dan kedalaman data yang terkumpul. Proses triangulasi diterapkan untuk memverifikasi konsistensi informasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber yang relevan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan menyeluruh mengenai dinamika kolaborasi antar pihak dalam penanganan anak jalanan, serta memahami berbagai tantangan yang dihadapi oleh masing-masing instansi dalam implementasinya. (Wasistiono, 2024)

Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, dan penyajian data secara naratif yang memfokuskan pada isu-isu utama penelitian. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi yang memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dan validasi dilakukan untuk memastikan keakuratan dan relevansi temuan dengan tujuan penelitian. Langkah-langkah analisis ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan terhadap penelitian mengenai penanganan anak jalanan di Kota Semarang.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh melalui pengolahan data, yang kemudian akan dianalisis dan dibahas secara mendalam untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai kolaborasi penanganan anak jalanan di Kota Semarang. Hasil yang diperoleh akan dikaitkan dengan teori untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai temuan-temuan dalam penelitian ini.

#### 3.1 Ketidakseimbangan sumber daya antar instansi

Penanganan masalah anak jalanan di Kota Semarang melibatkan tiga instansi utama, yakni Satpol PP, Dinsos dan Yayasan Anantaka. Namun, terlihat adanya ketidakseimbangan antara alokasi anggaran, jumlah personil, dan sarana prasarana yang ada berpotensi memengaruhi efektivitas penanganan. Hasil wawancara dengan para narasumber mengindikasikan adanya ketimpangan dalam alokasi anggaran penanganan anak jalanan di Kota Semarang. Satpol PP mengalokasikan dana sebesar Rp92.000.000 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), namun anggaran tersebut tidak secara eksplisit ditujukan untuk program anak jalanan, melainkan diperuntukkan bagi peningkatan kapasitas penanganan gangguan ketertiban umum secara umum. Dinsos, meskipun memiliki anggaran sebesar Rp535.000.000, harus membaginya untuk berbagai kelompok sosial yang lain, sehingga perhatian terhadap anak jalanan cenderung kurang optimal. Sementara itu, Yayasan Anantaka, sebagai lembaga nirlaba yang fokus pada penanganan anak jalanan, sangat bergantung pada bantuan pemerintah dan masyarakat, namun menghadapi keterbatasan sumber daya secara signifikan. Ketimpangan ini mencerminkan kurangnya prioritas terhadap kebutuhan spesifik anak jalanan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan publik.

Ketidakseimbangan juga tercermin dalam distribusi personel di antara para pemangku kepentingan. Satpol PP memiliki empat regu patroli yang masing-masing terdiri dari 15 personel, namun tugas mereka lebih terfokus pada penegakan ketertiban umum dan bukan pada penanganan langsung terhadap anak jalanan. Dinsos mengoperasikan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang memiliki peran strategis dalam merespons berbagai persoalan sosial, termasuk anak jalanan, tetapi jumlah personel yang terbatas serta cakupan isu yang luas menyebabkan intervensi menjadi tidak berkelanjutan. Sementara itu, Yayasan Anantaka mengandalkan relawan yang jumlah dan ketersediaannya tidak menentu, sehingga pelaksanaan program menjadi tidak konsisten dan kurang mampu menjawab kompleksitas masalah anak jalanan secara komprehensif. Kondisi ini menyoroti perlunya penguatan sumber daya manusia melalui perekrutan, pelatihan, dan pembagian peran yang lebih proporsional antarinstansi.

Aspek lain yang menunjukkan ketimpangan adalah pada alokasi sarana dan prasarana. Satpol PP memiliki fasilitas operasional yang relatif lengkap seperti kendaraan patroli, truk dalmas, dan perangkat komunikasi, namun tidak dilengkapi dengan sarana pendukung rehabilitasi sosial anak jalanan. Dinsos telah menyediakan akses terhadap layanan pendidikan dasar dan kesehatan, namun keterbatasan daya tampung dan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam implementasi yang berkelanjutan. Yayasan Anantaka menyediakan fasilitas sederhana seperti aula serbaguna yang digunakan untuk berbagai aktivitas pembinaan dan edukasi, namun keterbatasan dalam hal pendanaan dan ketergantungan pada relawan mengurangi daya jangkauannya. Ketimpangan dalam ketersediaan dan distribusi sarana-prasarana ini menekankan perlunya sinergi antarlembaga dalam perencanaan dan pelaksanaan program, agar penanganan anak jalanan dapat dilakukan secara terintegrasi, berdaya guna, dan berkelanjutan.

### **3.2 Insentif untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan**

Penekanan pentingnya kondisi awal sebagai prasyarat keberhasilan kolaborasi antar instansi, termasuk melalui pemberian insentif yang dapat memotivasi para pelaksana kebijakan. Dalam konteks penanganan anak jalanan di Kota Semarang, dimensi ini menunjukkan kelemahan signifikan karena tidak terdapat insentif khusus yang diberikan kepada pegawai yang terlibat dalam program tersebut. Pegawai dari instansi pemerintah seperti Satpol PP dan Dinsos menjalankan tugas penanganan anak jalanan semata-mata karena hal tersebut merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta struktur kelembagaan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut dipandang sebagai kewajiban administratif yang melekat pada jabatan, tanpa adanya tambahan berupa insentif finansial ataupun bentuk penghargaan lain yang dapat meningkatkan motivasi kerja dalam menghadapi permasalahan sosial yang kompleks dan menuntut empati tinggi.

Yayasan Anantaka sebagai organisasi nirlaba yang memusatkan perhatian pada rehabilitasi anak jalanan justru mengandalkan partisipasi relawan yang bekerja tanpa menerima kompensasi finansial. Motivasi utama para relawan bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial, yang menjadi pendorong utama keterlibatan mereka dalam kegiatan yayasan. Namun, terbatasnya jumlah relawan yang memiliki kapasitas dan pelatihan memadai menjadi hambatan tersendiri dalam menjamin kontinuitas dan kualitas program pendampingan serta rehabilitasi yang dijalankan.

Kurangnya insentif yang bersifat formal dan terstruktur, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, berpotensi memengaruhi semangat kerja dan efektivitas implementasi program penanganan anak jalanan. Ketika tidak tersedia penghargaan atau dukungan tambahan, maka upaya maksimal dalam menjawab persoalan sosial seperti anak jalanan sangat bergantung pada komitmen pribadi, loyalitas terhadap institusi, dan lingkungan kerja yang mendukung. Situasi ini menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi lintas instansi memerlukan penguatan motivasi internal maupun eksternal, termasuk melalui kebijakan pemberian insentif yang adil dan proporsional sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja dan keberlanjutan program sosial.

### **3.3 Kemampuan kepemimpinan Dalam Memfasilitasi Komunikasi**

Komunikasi yang efektif merupakan elemen fundamental dalam kerangka *collaborative governance*, karena menjadi landasan terciptanya koordinasi dan kolaborasi yang produktif antar berbagai instansi yang terlibat. Dalam konteks penanganan anak jalanan di Kota Semarang, komunikasi antar lembaga pemerintah dan organisasi nirlaba masih menunjukkan disparitas yang mencolok dari segi intensitas dan efektivitasnya. Satpol PP sebagai instansi pemerintah melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinsos setiap tiga bulan sekali, yang umumnya difokuskan pada pembahasan peningkatan jumlah Penyandang Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT), khususnya menjelang perayaan hari besar seperti Natal dan Tahun Baru. Rapat ini menjadi titik awal dalam perencanaan penertiban anak jalanan secara lebih intensif dan setiap kebijakan yang diambil merupakan hasil dari kesepakatan bersama yang dicapai dalam forum tersebut. Tugas pemimpin dalam konteks ini adalah memastikan bahwa seluruh instansi memahami peran masing-masing dan menjalankan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun sebelumnya.

Implementasi hasil koordinasi terlihat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, di mana Satpol PP menjalankan penertiban berdasarkan kesepakatan rapat dan SOP yang telah disepakati. Namun, rendahnya frekuensi rapat dapat membatasi kelancaran komunikasi dan menurunkan

efektivitas respons terhadap dinamika permasalahan anak jalanan yang bersifat fluktuatif. Di sisi lain, Yayasan Anantaka menunjukkan model komunikasi yang lebih intensif dan partisipatif. Rapat koordinasi mingguan yang dilakukan oleh para relawan tidak hanya menjadi forum untuk menyusun materi pelatihan dan kegiatan harian, tetapi juga menjadi wahana penting untuk memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan tetap terarah dan relevan dengan kebutuhan anak jalanan. Peran direktur yayasan sangat sentral dalam menciptakan komunikasi yang terbuka, transparan, dan solutif antara pihak manajemen dan relawan, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan lapangan dengan strategi operasional yayasan.

Hasil dari rapat mingguan tersebut segera diterjemahkan ke dalam aksi nyata, menunjukkan efektivitas komunikasi internal yang mampu memastikan keselarasan antara keputusan strategis dan pelaksanaan teknis. Selain itu, rapat mingguan juga memberikan ruang reflektif bagi para relawan untuk menyampaikan tantangan yang dihadapi dan memberikan umpan balik terhadap program yang dijalankan, yang kemudian dijadikan dasar oleh pimpinan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan. Perbedaan signifikan dalam frekuensi dan pola komunikasi antara lembaga pemerintah seperti Satpol PP dan Dinsos dengan organisasi masyarakat sipil seperti Yayasan Anantaka menunjukkan adanya ketimpangan dalam kapasitas pengelolaan komunikasi antar instansi. Kondisi ini menggarisbawahi urgensi peningkatan frekuensi dan kualitas koordinasi antar seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan anak jalanan. Komunikasi yang terstruktur dan berlangsung secara kontinu menjadi indikator penting keberhasilan kolaborasi, sekaligus mencerminkan efektivitas kepemimpinan dalam mengelola interaksi antar instansi guna mencapai tujuan sosial secara sinergis dan berkelanjutan.

### **3.4 Kemampuan pemimpin dalam mengelola konflik dengan bijak**

Kemampuan pemimpin dalam mengelola konflik secara bijaksana memainkan peran krusial dalam menciptakan harmoni dan memperkuat kolaborasi antar instansi yang terlibat dalam penanganan anak jalanan. Di lingkungan Satpol PP, pemimpin menunjukkan sikap responsif dan partisipatif dalam menghadapi dinamika yang muncul di dalam tim, khususnya setelah pelaksanaan patroli. Setiap ketegangan atau potensi konflik dikelola melalui komunikasi terbuka, di mana anggota tim diberikan ruang untuk menyampaikan laporan secara langsung serta berdiskusi secara kolektif. Praktik ini memungkinkan pemimpin untuk memahami berbagai sudut pandang, sekaligus merumuskan solusi bersama yang tidak hanya meredakan konflik, tetapi juga menjaga efektivitas pelaksanaan tugas penertiban anak jalanan. Kepekaan terhadap dinamika internal ini menunjukkan bahwa pemimpin tidak hanya fokus pada hasil operasional, melainkan juga pada kualitas hubungan antar anggota tim. Pendekatan ini berimplikasi pada meningkatnya rasa solidaritas dan tanggung jawab kolektif, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan bersama secara lebih optimal.

Pelaksanaan manajemen konflik yang inklusif juga tampak dalam praktik kepemimpinan di Dinsos. Melalui pertemuan evaluasi rutin dan diskusi informal, pemimpin memberikan ruang yang setara bagi setiap anggota tim maupun mitra eksternal untuk menyampaikan pandangan dan kendala yang dihadapi selama implementasi program. Strategi ini memperlihatkan komitmen terhadap prinsip kesetaraan dan penghargaan terhadap keberagaman perspektif, yang menjadi fondasi penting dalam membangun kesepahaman kolektif. Proses resolusi konflik difokuskan pada pencarian solusi yang bersifat kolaboratif, dengan tetap mempertimbangkan aspirasi semua pihak agar tercipta sinergi yang berkelanjutan. Dalam suasana kerja yang dilandasi oleh keterbukaan dan rasa saling menghormati, setiap individu merasa dihargai keberadaannya, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir sejak awal. Penerapan pendekatan kepemimpinan yang humanis ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan program sosial, khususnya dalam upaya

rehabilitasi dan pemberdayaan anak jalanan.

Yayasan Anantaka menunjukkan bentuk pengelolaan konflik yang lebih personal dan partisipatif, terutama ketika berhadapan langsung dengan anak jalanan sebagai subjek utama intervensi sosial. Direktur yayasan secara aktif mengambil peran dalam menangani situasi konflik yang muncul, misalnya ketika anak jalanan menolak mengikuti pelatihan yang telah disiapkan. Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang dilakukan bukan bersifat koersif, melainkan komunikatif dan persuasif, dengan mendengarkan langsung aspirasi dan perasaan anak-anak tersebut. Proses dialog ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan ketegangan, tetapi juga untuk membangun hubungan emosional yang positif, menumbuhkan rasa saling percaya antara anak jalanan dan para relawan, serta memperkuat keterikatan mereka terhadap program yang dijalankan. Strategi ini memperlihatkan bahwa pemimpin dalam organisasi nirlaba memiliki peran strategis dalam membangun atmosfer yang mendukung partisipasi aktif serta memperkuat kohesi sosial dalam pelaksanaan program.

Praktik kepemimpinan yang responsif terhadap konflik di Satpol PP, Dinsos, dan Yayasan Anantaka mencerminkan pemahaman yang mendalam khususnya dalam aspek komunikasi efektif dan resolusi konflik yang inklusif. Keberhasilan dalam mengelola perbedaan pandangan secara terbuka dan adil menjadi indikator penting dalam menciptakan sinergi antar instansi serta meningkatkan kualitas implementasi program penanganan anak jalanan secara terpadu. Pemimpin yang mampu menjembatani konflik dengan pendekatan reflektif dan empatik akan lebih berpeluang menciptakan kesepakatan bersama yang berkelanjutan, serta mendorong tercapainya tujuan kolektif yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan anak jalanan secara lebih menyeluruh.

### **3.5 Prosedur atau aturan yang jelas terkait penanganan anak jalanan**

Penanganan anak jalanan di Kota Semarang menunjukkan pentingnya prosedur yang jelas dan terstruktur sebagai landasan utama dalam mewujudkan kolaborasi yang efektif antar berbagai instansi. Setiap institusi yang berperan, seperti Satpol PP, Dinsos, dan Yayasan Anantaka, telah mengembangkan dan menerapkan prosedur masing-masing yang dirancang secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan program penanganan anak jalanan yang terkoordinasi, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Satpol PP, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap ketertiban umum, mengoperasikan prosedur penertiban anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dengan tahapan operasional yang harus diikuti secara disiplin oleh setiap tim patroli. Prosedur ini mencakup mekanisme tindakan di lapangan yang menitikberatkan pada pendekatan persuasif dan penegakan hukum yang berkeadilan, serta pengalihan anak jalanan kepada Dinsos untuk proses lanjutan.

Struktur kerja Dinsos dirancang dengan SOP yang mendetail dan menyeluruh, mencakup tahapan mulai dari identifikasi awal, asesmen sosial, pendampingan, hingga reunifikasi dengan keluarga atau pengalihan ke lembaga rehabilitasi yang relevan. Kepala Dinsos berperan aktif dalam memastikan konsistensi penerapan SOP tersebut, termasuk melalui evaluasi berkala yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program yang dijalankan. Penanganan oleh Dinsos mengakomodasi kebutuhan multidimensional anak jalanan melalui penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, akses kesehatan, bimbingan psikososial, serta pelatihan keterampilan. Mekanisme kerja yang terstandarisasi ini memperkuat kapasitas institusional Dinsos dalam merespons kompleksitas masalah anak jalanan secara responsif dan adaptif, sekaligus memastikan bahwa setiap intervensi berbasis kebutuhan spesifik anak.

Yayasan Anantaka, sebagai organisasi nirlaba yang memiliki fokus utama pada pemulihan dan pemberdayaan anak jalanan, turut mengadopsi prosedur yang bersifat partisipatif dan

berorientasi pada kebutuhan individual anak. Tahapan yang diterapkan oleh yayasan mencakup proses identifikasi, pembinaan karakter, pelatihan keterampilan hidup, pendidikan informal, hingga fasilitasi reintegrasi ke masyarakat atau keluarga. Seluruh prosedur tersebut dikoordinasikan oleh direktur yayasan bersama tim profesional dan relawan terlatih, dengan pendekatan yang humanistik dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Evaluasi implementasi prosedur dilakukan secara berkala guna menilai keberhasilan intervensi dan melakukan penyesuaian strategi berdasarkan dinamika yang terjadi di lapangan. Prosedur yang sistematis ini memperlihatkan komitmen Yayasan Anantaka dalam menjalankan fungsi sosialnya secara terencana dan bertanggung jawab, serta menegaskan pentingnya struktur organisasi yang fleksibel namun disiplin dalam menjalankan mandat pemberdayaan anak jalanan.

Keseluruhan prosedur yang dikembangkan oleh ketiga instansi tersebut memperlihatkan pentingnya kerangka kerja yang terstruktur dalam mendukung implementasi *collaborative governance* yang efektif. Adanya prosedur yang terintegrasi tidak hanya memfasilitasi koordinasi lintas sektor, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan program penanganan anak jalanan secara menyeluruh. Sistem kerja berbasis prosedur ini menjadi fondasi yang memungkinkan terciptanya intervensi sosial yang holistik, terarah, dan mampu menjawab kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh anak jalanan di lingkungan perkotaan.

### **3.6 Kejelasan struktur organisasi terkait**

Kejelasan struktur organisasi dalam penanganan anak jalanan merupakan elemen fundamental dalam implementasi *collaborative governance*, yang menekankan pentingnya tatanan kelembagaan yang tertata rapi guna mendukung keberhasilan kolaborasi antar instansi. Struktur organisasi yang terdefinisi secara sistematis tidak hanya memberikan pedoman yang eksplisit bagi setiap individu dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga menjamin bahwa seluruh kegiatan dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks penanganan anak jalanan di Kota Semarang, kejelasan struktur tampak nyata dalam ketiga institusi utama yang terlibat, yakni Satpol PP, Dinsos, dan Yayasan Anantaka. Satpol PP menjalankan tugasnya dalam penegakan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada dengan dukungan SOP yang disusun secara rinci dan dijalankan secara konsisten. Sebelum melaksanakan kegiatan patroli, setiap anggota diwajibkan mengikuti apel sebagai bentuk internalisasi terhadap tugas dan tanggung jawab, serta pengingat atas etika profesional yang harus dijunjung tinggi selama bertugas. Apel tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan operasional dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara langsung oleh pimpinan melalui observasi di lapangan, guna menjamin bahwa implementasi kegiatan sesuai dengan pedoman teknis dan tidak menyimpang dari ketentuan prosedural yang telah ditetapkan.

Dinsos Kota Semarang menampilkan struktur kelembagaan yang tidak kalah terorganisir dalam pelaksanaan program penanganan anak jalanan. Langkah awal dimulai dengan proses pendataan dan verifikasi latar belakang keluarga anak jalanan untuk menentukan intervensi yang paling sesuai. Apabila diketahui bahwa anak tersebut masih memiliki keluarga, maka dilakukan upaya reunifikasi melalui mediasi dan fasilitasi sosial. Sebaliknya, jika anak tersebut berada dalam kondisi terlantar tanpa dukungan keluarga, maka Dinsos menyediakan alternatif penanganan berupa layanan rehabilitasi sosial di panti, pemberian akses pendidikan informal maupun formal, serta penyediaan layanan kesehatan dasar. Seluruh alur kerja ini diatur dalam kerangka SOP yang terstruktur dan dipantau secara berkala oleh pimpinan guna menjamin bahwa setiap anak mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Kejelasan alur kerja ini

memberikan arah yang kuat bagi setiap petugas lapangan dalam menjalankan tanggung jawab mereka secara konsisten dan terukur.

Yayasan Anantaka sebagai instansi non-pemerintah yang berfokus pada pemulihan dan pemberdayaan anak jalanan juga menunjukkan pola struktur organisasi yang jelas dan fungsional. Di tingkat tertinggi terdapat seorang direktur yang memegang kendali strategis atas seluruh kegiatan yayasan dan bertanggung jawab atas arah kebijakan lembaga. Posisi perencanaan program ditempati oleh tim yang menyusun kerangka kerja dan merancang kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan anak jalanan berdasarkan hasil asesmen lapangan. Tiga kepala bidang dibentuk untuk mengoordinasikan berbagai aspek program, mencakup bidang pelatihan keterampilan, pendidikan, serta pendampingan sosial dan psikologis. Pelaksanaan program dijalankan oleh para relawan yang memiliki peran vital, mulai dari proses identifikasi anak di lapangan, penyampaian materi pelatihan, hingga pendampingan personal secara langsung. Setiap peran dalam struktur ini dirancang agar saling melengkapi dan terhubung secara fungsional, memungkinkan terjadinya alur kerja yang sinergis dan kolaboratif antar individu maupun antar divisi di dalam organisasi. Kejelasan struktur organisasi ini tidak hanya mendukung efektivitas operasional, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang transparan, bertanggung jawab, serta kondusif bagi pencapaian tujuan pemberdayaan sosial anak jalanan secara berkelanjutan.

Kejelasan struktur organisasi dalam penanganan anak jalanan di Kota Semarang terbukti menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kolaborasi yang efektif di antara berbagai instansi, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah. Penerapan struktur yang tertata dan sistematis oleh Satpol PP, Dinsos, dan Yayasan Anantaka menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik mampu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta ketepatan dalam pelaksanaan program.

### **3.7 Partisipasi yang inklusif antar instansi terkait**

Partisipasi yang inklusif dalam penanganan anak jalanan di Kota Semarang menjadi landasan penting dalam membangun kolaborasi antar instansi yang efektif dan berkelanjutan. Pelibatan aktif dari berbagai instansi, menekankan pada prinsip keterbukaan, transparansi, serta pengambilan keputusan secara partisipatif. Dalam praktiknya, koordinasi antara Satpol PP dan Dinsos berlangsung melalui forum rapat koordinasi rutin yang diadakan setiap tiga bulan. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana evaluatif terhadap program yang telah dijalankan, tetapi juga menjadi wahana untuk merumuskan strategi penanganan berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi di lapangan. Komunikasi intensif dan pembagian tugas yang terstruktur antara kedua instansi tersebut memungkinkan masing-masing pihak menjalankan peran secara sinergis sesuai dengan kewenangannya. Satpol PP menjalankan fungsi penegakan hukum dengan melakukan patroli dan penertiban anak jalanan di ruang publik berdasarkan regulasi daerah, sementara Dinsos mengambil peran lanjutan dengan menyediakan layanan sosial, pendidikan, dan rehabilitasi bagi anak-anak yang telah terjaring dalam proses tersebut.

Efektivitas koordinasi ini terwujud melalui penerjemahan hasil rapat ke dalam tindakan operasional, di mana setiap langkah yang diambil di lapangan telah melalui proses kesepakatan bersama yang berbasis pada pertimbangan multidisipliner. Keberadaan forum ini menjamin adanya kesinambungan komunikasi dan integrasi tindakan, yang pada akhirnya memperkuat dampak dari intervensi yang dilakukan. Di sisi lain, Yayasan Anantaka menerapkan pola koordinasi internal yang serupa, namun dengan intensitas yang lebih tinggi dalam bentuk rapat mingguan para relawan. Forum ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas materi pelatihan, menyesuaikan pendekatan pendidikan non-formal, serta menyusun rencana kerja yang adaptif terhadap kebutuhan anak jalanan

yang menjadi sasaran program. Partisipasi aktif para relawan dalam proses pengambilan keputusan memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan bersifat responsif dan relevan. Keputusan yang diambil dalam rapat secara langsung diimplementasikan dalam sesi pelatihan dan kegiatan pendampingan yang berlangsung tiga kali dalam seminggu, dengan fokus pada proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

Keterlibatan menyeluruh dari berbagai instansi melalui mekanisme rapat koordinasi, baik pada level institusi pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, memperlihatkan suatu pola kerja kolaboratif yang menjunjung tinggi nilai inklusivitas dan kesetaraan peran. Proses ini memastikan bahwa setiap pihak tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan dan strategi yang kontekstual serta berbasis kebutuhan. Dengan adanya komunikasi terbuka, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, penanganan anak jalanan di Kota Semarang bergerak menuju arah yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan upaya penanganan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan berorientasi pada keberlanjutan sosial.

### **3.8 Peran Keterbukaan dalam Proses Kolaborasi**

Keterbukaan dalam proses kolaborasi antar instansi yang terlibat dalam penanganan anak jalanan di Kota Semarang merepresentasikan penerapan prinsip transparansi. Transparansi komunikasi dan pelaporan menjadi elemen kunci yang memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap setiap program yang dijalankan. Praktik keterbukaan ini diwujudkan melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi kegiatan, pelaporan kinerja, serta interaksi langsung dengan masyarakat. Satpol PP secara aktif mengelola akun Instagram @satpolpp.smg sebagai media untuk membagikan informasi terkait aktivitas mereka, seperti kegiatan patroli, rapat koordinasi, pengawalan, serta dokumentasi kunjungan kerja. Seluruh kegiatan tersebut dipublikasikan secara rutin dan terstruktur guna memastikan bahwa masyarakat dapat memantau langsung dinamika operasional yang dilaksanakan oleh instansi penegak ketertiban ini. Komitmen terhadap keterbukaan juga ditunjukkan oleh Dinsos melalui akun media sosial @dinsoskotasmg, yang menjadi kanal resmi dalam mendiseminasi berbagai kegiatan seperti apel harian, pelaksanaan bimbingan teknis, distribusi bantuan sosial, serta proses pengajuan fasilitas BPJS bagi kelompok rentan.

Transparansi yang ditunjukkan oleh Dinsos tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, tetapi juga sebagai alat edukasi sosial mengenai mekanisme layanan yang tersedia bagi anak jalanan. Di sisi lain, Yayasan Anantaka sebagai organisasi non-pemerintah turut berperan aktif dalam menunjukkan keterbukaan informasi melalui akun Instagram resmi @anantaka.ct. Yayasan ini secara konsisten mempublikasikan kegiatan pemberdayaan yang mereka selenggarakan, termasuk pelatihan keterampilan, program sosialisasi, serta aktivitas rehabilitasi psikososial yang ditujukan kepada anak jalanan. Praktik pelaporan ini memberikan ruang bagi masyarakat umum untuk mengetahui dan memahami secara komprehensif langkah-langkah strategis yang diambil oleh yayasan dalam mendukung pemulihan dan integrasi sosial anak jalanan ke dalam lingkungan masyarakat. Selain sebagai sarana dokumentasi dan pertanggungjawaban, media sosial juga berfungsi sebagai platform partisipatif, di mana masyarakat dapat berinteraksi, memberikan tanggapan, serta menyampaikan laporan terkait temuan anak jalanan di wilayah masing-masing. Keterlibatan publik dalam bentuk digital ini memperluas jangkauan pelibatan sosial, sehingga masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam upaya menjaga ketertiban dan mendukung keberlanjutan program-program sosial.

Keterbukaan yang ditunjukkan oleh ketiga instansi, baik pemerintah maupun non-pemerintah,

tidak hanya memperkuat kohesi antar instansi dalam proses kolaborasi, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan mereka dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Transparansi ini mengurangi potensi kesalahpahaman serta membangun persepsi positif masyarakat terhadap berbagai intervensi yang dilakukan. Pemanfaatan media sosial dalam menyampaikan informasi secara real-time menjadi sarana strategis dalam menciptakan komunikasi dua arah yang inklusif dan adaptif. Selain itu, publikasi aktivitas yang dilakukan secara konsisten memberikan ruang bagi proses refleksi dan evaluasi publik, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan legitimasi terhadap program penanganan anak jalanan. Oleh karena itu, keterbukaan dalam proses kolaborasi ini merupakan instrumen penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan mitra sosialnya dalam menghadapi isu sosial yang kompleks seperti permasalahan anak jalanan.

### **3.9 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil penelitian mengenai kolaborasi antarinstansi dalam penanganan anak jalanan di Kota Semarang menunjukkan bahwa kejelasan struktur organisasi, koordinasi yang rutin dan efektif, serta keterbukaan komunikasi menjadi faktor kunci keberhasilan program, sekaligus memperkuat temuan berbagai studi sebelumnya di Indonesia. Pendekatan terintegrasi seperti yang diterapkan dalam program RAISALAHDAKU oleh Dinsos Kota Padang, serta model community development oleh Rumah Singgah Dukuh Semar di Cirebon, terbukti sejalan dengan praktik yang dilakukan oleh Dinsos dan Yayasan Anantaka di Semarang, yang mengedepankan pendampingan sosial, reintegrasi keluarga, pelatihan keterampilan, dan keterlibatan relawan secara aktif. Kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya inovasi kebijakan, dan lemahnya koordinasi yang ditemukan dalam penelitian di Makassar, Serang, dan Surabaya, berhasil direspons melalui penguatan struktur kelembagaan, forum koordinasi berkala, serta penggunaan media sosial sebagai sarana transparansi dan edukasi publik di Kota Semarang. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dan pencegahan relapse, tetapi juga menciptakan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam menanggulangi anak jalanan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting berupa model kolaborasi yang terstruktur dan berbasis keterbukaan, yang dapat direplikasi oleh daerah lain sebagai solusi komprehensif dan berkelanjutan dalam penanganan anak jalanan.

### **3.10 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Gambaran dinamika kolaborasi penanganan anak jalanan di Kota Semarang antara Satpol PP, Dinsos, dan Yayasan Anantaka tidak berjalan secara efektif. Hambatan utama terletak pada lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya insentif partisipasi. Meski prosedur dan struktur kelembagaan telah ada, implementasinya belum mampu menciptakan sinergi karena tumpang tindih peran dan kurangnya komunikasi. Kolaborasi cenderung bersifat formal dan belum menyentuh aspek keberlanjutan serta perlindungan hak anak secara menyeluruh.

## **IV. KESIMPULAN**

Penanganan anak jalanan membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas instansi yang terstruktur dan berkelanjutan, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Satpol PP, Dinsos, dan Yayasan Anantaka tidak berjalan secara optimal. Ketimpangan dalam sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan sarana prasarana, serta ketiadaan insentif bagi petugas maupun relawan, menjadi hambatan awal yang signifikan dalam mendorong partisipasi aktif dan mempertahankan keberlanjutan program. Selain itu, meskipun kepemimpinan dari masing-masing

pihak cukup berperan dalam memfasilitasi komunikasi dan penyelesaian konflik, pendekatan yang digunakan masih cenderung sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi. Prosedur operasional standar dalam penanganan anak jalanan memang telah disusun, namun pelaksanaannya membutuhkan koordinasi lebih lanjut agar dapat berjalan secara holistik dan konsisten. Dalam praktiknya, koordinasi antar instansi sudah dilakukan, tetapi belum responsif terhadap perubahan kondisi di lapangan, sehingga efektivitas program menjadi terbatas. Pelaporan aktivitas kolaborasi melalui media sosial menunjukkan adanya transparansi dan keterbukaan terhadap masyarakat, namun langkah ini perlu diperkuat dengan komunikasi lintas instansi yang lebih intensif dan sistem pelaporan yang lebih terstruktur. Oleh karena itu, penguatan sinergi antar instansi, penyediaan insentif, serta peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi kunci penting dalam menciptakan penanganan anak jalanan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek waktu pengambilan data, yang menyebabkan proses observasi dan wawancara tidak dapat dilakukan secara lebih mendalam dan berulang. Keterbatasan waktu ini juga membatasi penelusuran dinamika kolaborasi antar instansi dalam jangka panjang, sehingga hasil yang diperoleh hanya mencerminkan kondisi pada saat tertentu dan belum sepenuhnya merepresentasikan perkembangan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penelitian ini merupakan langkah awal dalam memahami dinamika kolaborasi antar instansi dalam penanganan anak jalanan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan dilakukannya studi lanjutan pada konteks dan wilayah berbeda guna memperkaya temuan serta mengidentifikasi pola kolaborasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat mengeksplorasi lebih dalam peran masyarakat sipil dan lembaga swadaya dalam memperkuat jejaring kolaboratif penanganan anak jalanan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Satpol PP, Dinsos, dan Yayasan Anantaka beserta seluruh jajarannya atas dukungan, kerjasama, dan kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Kontribusi dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait telah memberikan peran penting dalam kelancaran dan keberhasilan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2020). *Street Children and the Role of Social Work: A Case Study in South Asia*.  
<https://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/article/view/3206>
- Alifa Fairuz Shabira, S. et al. (2024). *Inovasi Dinas Sosial Kota Padang Dalam Penanganan Anak Jalanan Melalui Program Raisalah Daku*. 3.  
<http://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/3699/3476>
- Bappenas. (2023). Laporan Pelaksanaan Peneleapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 2023, 01, 221.
- Darmawan, E. (2023). Kota Semarang Raih Penghargaan KLA Kategori Utama dari Kementerian PPPA. 23/07/2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/07/23/12265401/kota-semarang-raih-penghargaan-kla-kategori-utama-dari-kementerian-pppa>
- Dion. (2024). *Apa Itu VOSviewer? Penjelasan, dan Fungsinya*. Monday, 26 February 2024 3:43 PM.  
<https://course-net.com/blog/apa-itu-vosviewer-penjelasan-dan-fungsinya/>
- Dispendukcapil. (2022). Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2022. *Dinas Kependudukan Dan*

*Pencatatan Sipil Kota Semarang*, 74.

Ecep Supriatna, Rahmat Syarif Hidayat, Eunkeu Agiatari, R. H. R. A. (2024). *Psychosocial-Based Counseling Training For Street Children Volunteers in Bandung City*.

<https://doi.org/10.70825/jptb.v6i2.2311>

Gabriel Julian. (2024). *Rehabilitating Street-Children: The Great Paradox*.

<https://academicjournals.org/journal/IJSA/article-abstract/82C930C71932>

Hasan, E. (2017). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan* (R. Sikumbang (ed.); 2nd ed.). Ghalia Indonesia.

Hasanah, B. et al. (2021). *Efektivitas Program Penanggulangan Anak Jalanan Berbasis Community Development di Kota Serang ( Studi Pada Program Rumah Singgah )*. 7(2), 81–93.

Nawi, R. (2023). MODEL PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.

R. Slamet, S. et al. (2021). Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan, Anak Jalanan, dan Pengemis di Kota Semarang). *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(1), 262–271.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/29858>

Rachman, D. T. (2023). *Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya*.

Saffanata, A. (2024). *Fenomena Anak Jalanan Di Daerah Tugu Muda Semarang*.

<https://blog.unnes.ac.id/saffanata/2015/11/16/fenomena-anak-jalanan-di-daerah-tugu-muda-semarang/>

Sandriana, N. (2022). *Policy Brief Tegakan Kembali Perlindungan Hukum Anak Jalanan*. December.

<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36593.56162>

Sekretariat RPJPN 2025-2045. (2023). *Indonesia Emas 2045 Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045*.

<https://indonesia2045.go.id/>

Sosial, D. (2019). *Aliensi Diri pada Anak Jalanan*.

Suprpto, H. (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah* (Gosyen (ed.); pertama). Gosyen Publishing.

Suryadi, yeni miftahul zanah. (2021). Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Komunitas. *Teknik Bendungan*, August, 1–7. <https://doi.org/10.24235/orasi.v7i2.1075>

UNICEF. (2023). Laporan Tahunan 2023. *Laporan*, 1–526.

Wasistiono, S. (2024). *Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan* (1st ed.). PT Bumi Aksara.